

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan di Sumatera Barat

Muhammad Luthfi¹, Mike Triani²

^{1,2} Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: Mohluthfi2406@gmail.com

Info Artikel

Diterima:

10 Agustus 2022

Disetujui:

24 Agustus 2022

Terbit daring:

01 September 2022

DOI: -

Situs:

Luthfi, M., Triani, M(2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan di Sumatera Barat. JKEP: Jurnal kajian ekonomi dan pembangunan, 4(3)

Abstract

This study aims to prove and analyze (1) the effect of gross domestic product on the realization of PBB in West Sumatra. (2) the amount of land to the realization of PBB in West Sumatra (3) building area to the realization of PBB in West Sumatra. (4) inflation on the realization of PBB in West Sumatra. (5) together with GRDP, total land area, building area and inflation towards the realization of PBB in West Sumatra. This type of research is quantitative research. In this study, the data used is panel data from 2015 – 2019 in 19 districts and cities in West Sumatra. The method used is a panel regression model with the selected panel regression estimation model, namely the Random Effect Model (REM.) The results obtained show that: (1) GRDP is not significant to the realization of PBB in West Sumatra (2 land area has a significant effect on the realization of PBB in Sumatra). West Sumatra (3) building area has a significant effect on PBB realization in West Sumatra (4) inflation is not significant on PBB realization in West Sumatra Together with GRDP, land area, building area and inflation have a significant effect on PBB in West Sumatra. the results of the study that the increasing number of people who own land and inflation is still under control, it actually encourages the realization of the payment of Land and Building Taxes in West Sumatra, therefore by observing the factors that encourage changes in the realization of PBB payments can provide a solution in the form of policies for local government to improve the actual value of land and building tax payments in 19 districts and cities in West Sumatra.

Keywords: Land and building tax, gross domestic product, land area, building area, inflation

Abstrak

Penelitian ditujukan untuk membuktikan (1) pengaruh product domestic bruto terhadap realisasi PBB di Sumatera Barat. (2) jumlah lahan terhadap realisasi PBB di Sumatera Barat (3) luas bangunan terhadap realisasi PBB di Sumatera Barat. (4) inflasi terhadap realisasi PBB di Sumatera Barat. (5) secara bersama PDRB, jumlah lahan, luas bangunan dan inflasi terhadap realisasi PBB di Sumatera Barat. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data panel dari tahun 2015 – 2019 pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Metode yang digunakan adalah model regresi panel dengan model estimasi regresi panel terpilih yaitu Random Effect Model (REM.) Hasil penelitian diperoleh menunjukkan bahwa: (1) PDRB tidak signifikan terhadap realisasi PBB di Sumatera Barat (2 luas lahan berpengaruh signifikan terhadap realisasi PBB di Sumatera Barat. (3) luas bangunan berpengaruh signifikan terhadap realisasi PBB di Sumatera Barat. (4) inflasi tidak signifikan terhadap realisasi PBB di Sumatera Barat. Secara bersama-sama PDRB, luas lahan, luas bangunan dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap PBB di Sumatera Barat. Dari hasil penelitian semakin banyaknya masyarakat yang memiliki luas lahan serta masih terkendalinya inflasi, justru mendorong masih belum tercapainya realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Sumatera Barat, oleh sebab itu dengan mengamati faktor yang mendorong perubahan realisasi pembayaran PBB tersebut dapat memberikan sebuah solusi dalam bentuk kebijakan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai realiasi pembayaran Pajak PBB 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Kata Kunci : Pajak bumi dan bangunan, product domestic bruto, luas lahan, luas bangunan, inflasi

PENDAHULUAN

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang terletak di wilayah pantai Barat Sumatera. Sebagian besar geografis Sumatera Barat di dominasi oleh laut dan sebagian lagi didominasi oleh wilayah perbukitan. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang tidak memiliki banyak potensi sumber daya alam galian, akan tetapi Sumatera Barat memiliki keindahan alam yang dapat dikembangkan untuk kegiatan wisata. Pajak berfungsi penting dalam mendorong perekonomian sebuah negara, karena dana yang diperoleh dari pajak akan menambah pemasukan pemerintah sehingga dapat mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Pajak Bumi Bangunan (PBB) menjadi salah satu instrument yang dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), untuk melakukan pengumpulan PBB pemerintah daerah menugaskan masih masing kepala desa atau kepala jorong hingga pemerintah legislative dimasing masing kabupaten dan kota di Indonesia pada umumnya dan Sumatera Barat pada khususnya. Permasalahan yang terus terjadi di Indonesia dan Sumatera Barat pada umumnya berkaitan dengan pembayaran PBB adalah tidak tercapainya realisasi target pembayaran PBB pada sejumlah 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat akibatnya target pendapatan asli daerah yang dicanangkan pemerintah juga tidak terwujud.

Tidak ada satu pun daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat yang mampu memenuhi realisasi PBB antara 75% sampai dengan 85% dari tahun 2015 – 2019 yang lalu. . Jika dirata-ratakan total persentase realisasi PBB tahun 2015 sampai dengan 2019 memang relatif mengalami peningkatan, akan tetapi tidak seluruh kabupaten dan kota yang mampu mencapai peningkatan target, dalam hal ini masih terdapat sejumlah kabupaten dan kota yang masih jauh dari target yang dibebankan pemerintah daerah. Jika hal tersebut terus dibiarkan maka pendapatan pemerintah dari sektor pajak tidak akan maksimal, oleh sebab itu penting bagi peneliti untuk mencoba melakukan penelitian membahas sejumlah faktor yang mempengaruhi realisasi pembayaran PBB khususnya di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Menurut Badan Pusat Statistik Sumatera Barat tidak ada satu pun daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat yang mampu memenuhi realisasi PBB antara 75% sampai dengan 85% dari tahun 2015 – 2019 yang lalu. Dari data terlihat bahwa masih terjadi sejumlah permasalahan di sejumlah daerah sehingga realisasi PBB masih belum mencapai target. Jika dirata-ratakan total persentase realisasi PBB tahun 2015 sampai dengan 2019 memang relatif mengalami peningkatan, akan tetapi tidak seluruh kabupaten dan kota yang mampu mencapai peningkatan target, dalam hal ini masih terdapat sejumlah kabupaten dan kota yang masih jauh dari target yang dibebankan pemerintah daerah. Jika hal tersebut terus dibiarkan maka pendapatan pemerintah dari sektor pajak tidak akan maksimal, oleh sebab itu penting bagi peneliti untuk mencoba melakukan penelitian membahas sejumlah faktor yang mempengaruhi realisasi pembayaran PBB khususnya di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang menjadi objek pajak PBB adalah bumi dan permukaan bumi, tubuh bumi serta kekayaan yang tersimpan di dalamnya yang meliputi tanah, bangunan pekarangan, sawah, empang, perairan, pedalaman serta laut yang terletak diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi pemerintah daerah PBB akan membantu pendapatan asli daerah oleh sebab itu realisasi pembayarannya harus mencapai sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu Febrianti, (2017) terdapat sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi realiasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diantaranya adalah *product domestic regional bruto*, luas lahan, dan jumlah kepala keluarga. Masing masing variabel diduga mempengaruhi peningkatan atau penurunan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan patokan pertumbuhan ekonomi sebuah daerah. PDRB menunjukkan sejauhmana tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai oleh suatu wilayah atau daerah. Selain itu PDRB menunjukan input yang diterima seluruh warga negara dalam berbagai sektor kehidupan. PDRB bisa dicari dengan menambahkan nilai output bersih perekonomian yang diperoleh dari total kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu, biasanya dihitung dalam satu tahun. Sesuai dengan uraian teori tersebut peneliti menduga bahwa semakin tinggi PDRB sebuah daerah akan meningkatkan realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sesuai dengan data yang peneliti peroleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat diketahui bahwa nilai PDRB

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustina, Susetyo, dan Yunisvita, (2016) menemukan bahwa terjadinya peningkatan pertumbuhan produk domestic regional bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian yang mendukung lainnya juga diperoleh oleh Yulianis, et al., (2017) yang menemukan bahwa peningkatan PDRB akan mendorong meningkatnya realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Sumatera Barat, selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Lisnawati, (2020) menemukan bahwa meningkatnya pertumbuhan produk domestic regional bruto sebuah daerah akan mendorong meningkatnya realisasi pembayaran PBB pada seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat.

Menurut Sa'diah, et al., (2019) besarnya nilai pembayaran PBB akan sangat bergantung pada lahan yang dimiliki masyarakat. Semakin besar luas lahan yang dimiliki masyarakat akan besar pula nilai pajak yang harus dibayarkan masyarakat kepada pemerintah. Oleh sebab itu peneliti menduga dengan semakin luasnya lahan yang dimiliki oleh masyarakat maka akan meningkatkan realisasi pembayaran PBB dengan asumsi kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban tersebut terus meningkat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lisnawati, (2020) menemukan bahwa luas lahan berpengaruh positif terhadap realisasi PBB pada seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat, hasil yang berbeda diperoleh oleh Agustina et al., (2016) menemukan bahwa luas lahan tidak berpengaruh signifikan terhadap realiasi pembayaran PBB di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya hasil penelitian yang sejalan juga diperoleh oleh Febrianti, (2017) yang menemukan bahwa besarnya luas lahan tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bangka Tengah. Dengan demikian terlihat terjadinya pro dan kontra hasil penelitian terdahulu.

Selain *product domestic regional bruto*, luas lahan dan jumlah kepala keluarga, terjadinya peningkatan realiasi pembayaran PBB juga dipengaruhi oleh jumlah kepala keluarga yang menjadi wajib pajak. Semakin banyak jumlah kepala keluarga maka akan semakin besar jumlah tagihan pajak, ketika seluruh anggota masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajiban pajaknya maka realiasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan semakin tinggi, dengan demikian peneliti menduga bahwa jumlah kepala keluarga yang menjadi wajib pajak berpengaruh positif terhadap realiasi pembayaran PBB pada sebuah daerah khususnya di Sumatera Barat.

Hasil penelitian Tiara (2016) menemukan bahwa luas bangunan tempat tinggal masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi Pajak Bumi dan Bungunan, hasil penelitian yang sejalan diperoleh oleh Febrianti (2017) yang menemukan bahwa semakin banyak masyarakat yang memiliki luas bangunan rumah yang luas akan semakin meningkatkan realiasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya hasil penelitian Wawan (2018) yang menemukan bahwa luas bangunan rumah berpengaruh positif dan signifikan terhadap realiasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sigi. Hal tersebut disebabkan semakin luas bangunan perumahan yang dimiliki masyarakat menunjukan

tingkat kesejahteraan yang semakin baik sehingga mendorong meningkat realiasi pembayaran Pajak dan Bangunan.

Adnan, (2011) mengungkapkan disamping luas lahan, hingga luas bangunan besarnya pencapaian realiasi PBB juga dapat dipengaruhi oleh angka inflasi yang terjadi disebuah daerah. Inflasi muncul ketika mata uang lokal terlalu banyak beredar dimasyarakat akibatnya nilai guna mata uang tersebut mengalami penurunan. Ketika inflasi mengalami peningkatan menunjukan terjadinya peningkatan harga berbagai kebutuhan pokok, akibatnya pengeluaran masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan akan relatif tinggi, keterbataan anggara yang dimiliki masyarakat mendorong ketidaksanggupan dari anggota masyarakat memenuhi kewajiban pajak khususnya PBB. Dengan demikian peneliti menduga bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap realiasi pembayaran PBB di sebuah daerah.

Hasil penelitian Agustina et al., (2016) menemukan inflasi berpengaruh positif terhadap realiasi PBB disejumlah daerah khususnya provinsi dipulau Jawa, Sumatera dan Bali. Hasil penelitian yang sejalan juga diperoleh oleh Brabowo, (2019) menemukan semakin tinggi inflasi yang terjadi pada sebuah daerah maka akan semakin menurunkan realiasi pembayaran PBB disebuah daerah. Selanjutnya hasil penelitian yang berbeda diperoleh oleh Adnan, (2011) yang menemuka inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap realiasi pembayaran PBB di sebuah daerah.

Permasalahan utama yang mendorong peneliti tertarik meneliti sejumlah faktor yang mempengaruhi realiasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat disebabkan terjadinya kenaikan PDRB pada sejumlah kabupaten dan kota, semakin banyaknya masyarakat yang memiliki luas lahan serta masih terkendalinya inflasi, justru mendorong masih belum tercapainya realiasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Sumatera Barat, oleh sebab itu dengan mengamati faktor yang mendorong perubahan realiasi pembayaran PBB tersebut dapat memberikan sebuah solusi dalam bentuk kebijakan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai realiasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustina, Susetyo, dan Yunisvita, (2016) menemukan bahwa terjadinya peningkatan pertumbuhan produk domestic regional bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap realiasi pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian yang mendukung lainnya juga diperoleh oleh Yulianis, et al., (2017) yang menemukan bahwa peningkatan PDRB akan mendorong meningkatnya realiasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Sumatera Barat. Temuan yang diperoleh menunjukan bahwa ketika nilai *product domestic regional bruto* meningkat menunjukan kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan, sehingga akan mendorong membaiknya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Lisnawati, (2020) menemukan bahwa meningkatnya pertumbuhan produk domestic regional bruto sebuah daerah akan mendorong meningkatnya realiasi pembayaran PBB pada seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lisnawati, (2020) menemukan bahwa luas lahan berpengaruh positif terhadap realiasi PBB pada seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat, Hasil yang diperoleh menunjukan semakin besar luas lahan maka jumlah tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan semakin tinggi, ketika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajiban PBB maka program pemerintah untuk mendorong meningkatnya jumlah realiasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan akan semakin meningkat

Hasil yang berbeda diperoleh oleh Agustina et al., (2016) menemukan bahwa luas lahan tidak berpengaruh signifikan terhadap realiasi pembayaran PBB di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan,CSelanjutnya hasil penelitian yang sejalan juga diperoleh oleh Febrianti, (2017) yang menemukan bahwa besarnya luas lahan tidak berpengaruh signifikan

terhadap realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bangka Tengah. Temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa luas atau tidaknya lahan yang dimanfaatkan masyarakat tidak akan menjamin meningkatnya realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada sebuah daerah, temuan yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa adanya variabel lain yang lebih mempengaruhi seperti kesadaran masyarakat atau wajib pajak, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya.

Hasil penelitian Tiara (2016) menemukan bahwa luas bangunan tempat tinggal masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi Pajak Bumi dan Bungunan. Hasil penelitian yang sejalan diperoleh oleh Febrianti (2017) yang menemukan bahwa semakin banyak masyarakat yang memiliki luas bangunan rumah yang luas akan semakin meningkatnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bangka Tengah. Temuan yang diperoleh tersebut menunjukkan ketika jumlah masyarakat yang memiliki rumah dengan luas bangunan yang luas akan mendorong meningkatnya realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Hal tersebut ketika masyarakat memiliki bangunan yang luas untuk dijadikan tempat tinggal atau dijadikan sebagai wadah usaha tentu memiliki kualitas ekonomi yang baik. Ketika masyarakat tersebut memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi maka akan mendorong meningkatnya kepatuhan untuk membayarkan pajak salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil penelitian Agustina et al., (2016) menemukan inflasi berpengaruh negatif terhadap realisasi PBB disebutlah daerah khususnya provinsi dipulau Jawa, Sumatera dan Bali. Hasil penelitian yang sejalan juga diperoleh oleh Brabowo, (2019) menemukan semakin tinggi inflasi yang terjadi pada sebuah daerah maka akan semakin menurunkan realisasi pembayaran PBB disebuah daerah. Hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat akan lebih mengutamakan penyediaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan, sehingga mereka tidak begitu memprioritaskan pembayaran pajak, atau mereka memilih menunggu pemerintah untuk memberikan kebijakan untuk meringankan nilai pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Selanjutnya hasil penelitian yang berbeda diperoleh oleh Adnan, (2011) yang menemuka inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi pembayaran PBB di sebuah daerah.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Indonesia dalam bentuk data *panel* dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 , dan data ini diperoleh dari database badan pusat statistic sumatera barat. Variabel yang digunakan adalah Product domestic regional bruto, Luas Lahan, Luas Bangunan dan Inflasi Penelitian ini menggunakan analisis data panel dimana data panel merupakan kombinasi antar data *time series* dan data *cross section*. Maka persamaan regresinya menggunakan alat eviews 9 sebagai berikut:

Model dari persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut :

$$(Y_{it}) = \alpha + \beta_1(X_{1it}) + \beta_2 (X_{2it}) + \beta_3(X_{3it}) + \dots + \beta_3(X_{4it}) + e_{it} \quad (1)$$

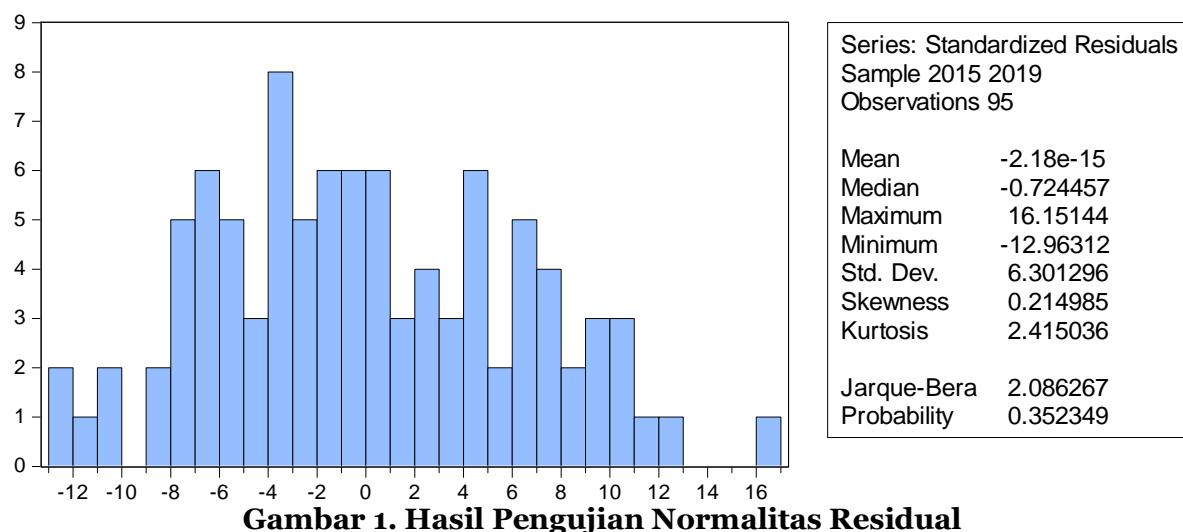
Dimana (Y_{it}) adalah realiasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), α adalah konstanta, $\beta_1\beta_2\beta_3$ adalah Koefisien Regresi, (X_{1it}) adalah *Product domestic regional bruto* kabupaten / kota i pada tahun t, (X_{2it}) adalah luas lahan i pada tahun t, (X_{3it}) adalah Luas bangunan i pada tahun t, (X_{4it}) adalah inflasi i pada tahun t dan e_{it} adalah *error term*.

Pembentukan model regresi yang tepat harus diiringinya dengan terbebas seluruh variabel penelitian dari penyipangan asumsi klasik. Berdasarkan hasil estimasi yang dilakukan, pada uji asumsi klasik tidak ditemukan masalah. Dalam rangka mendapatkan model persamaan regresi yang tepat maka terlebih dahulu dilakukan uji spesifikasi yang terdiri dari Uji Lagrange Multiplier, Uji Chow dan Uji Hausman:

Menurut Winarno (2014) uji bertujuan mengetahui pengaruh secara parsial antara setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini yaitu memperlihatkan apakah setiap variabel bebas yang dimaksudkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama dengan variabel terikat dilihat dengan menggunakan Eviews (Ghozali, 2016). Koefisien determinasi (R^2) mengukur tingkat sejauhmana variabel predictor mampu berkontribusi untuk mendorong perubahan pada variabel dependen yang diukur dengan persentase (Ghozali, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian pertama yang dilakukan adalah uji normalitas. Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji Jarque Bera (JB). Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh ringkasan hasil pengujian normalitas untuk masing-masing variabel terlihat pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Hasil Pengujian Normalitas Residual

Hasil yang diperoleh menunjukkan nilai residual yang dihasilkan telah memenuhi prosedur pengujian sehingga seluruh variabel penelitian dinyatakan telah berdistribusi norma sehingga prosedur pengujian data selanjut dapat dilanjutkan.

Model pengujian regresi panel seperti yang dijelaskan oleh Winarno, (2014) terdiri dari model regresi yang dapat dipilih. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan Eviews 8 diperoleh uraian hasil pengolahan regresi panel seperti terlihat dibawah ini:

Analisis dengan menggunakan *common effect model* dapat digunakan ketika pengujian persyaratan Chow dan Hausman tidak menentukan pemilihan model yang tepat Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh hasil seperti terlihat pada Tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Model Regresi Panel Common Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	54.47238	16.89774	3.223648	0.0018
Pdrb	-0.426562	1.354197	-0.314992	0.7535
Lahan	1.431611	0.544014	2.631571	0.0315
Bangunan	0.245402	0.043780	5.605345	0.0000
Inflasi	-0.001961	0.512725	-0.003824	0.9970

Model common effect akan digunakan ketika pengujian persyaratan Chow dan *Hausman test* tidak terpenuhi. *common effect model*. Analisis *common effect model* akan memberikan

gambaran keseluruhan dan bagaimana pengaruh yang terbentuk diantara variabel independen tehadap variabel dependen secara baik dan akurat.

Fixed effect atau model variance panel tetap yang disajikan dalam penelitian ini terlihat di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Olahan Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	54.47238	16.89774	3.223648	0.0018
PDRB	-0.426562	1.354197	-0.314992	0.7535
Lahan	1.431611	0.544014	2.631571	0.0315
Bangunan	0.245402	0.043780	5.605345	0.0000
Inflasi	-0.001961	0.512725	-0.003824	0.9970

Sesuai dengan hasil pengujian *fixed effect model* (FEM) terlihat memberikan hasil yang relatif sama dengan *common effect model* (CEM). *Fixed effect model* akan digunakan ketika memenuhi persyaratan pengujian Chow.

Bersamaan dengan hasil pengolahan data yg telah dilakukan diperoleh kesimpulan hasil dengan menggunakan *Random Effect Model* (REM) seperti terlihat dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Hasil Olahan Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	54.44506	16.41326	3.317138	0.0013
PDRB	-0.442148	1.315005	-0.336233	0.7375
Lahan	1.461328	0.725573	2.014032	0.0470
Bangunan	0.243740	0.036672	6.646488	0.0000
Inflasi	0.009029	0.502091	0.017983	0.9857

Sesuai dengan hasil pengolahan terlihat bahwa setiap variabel independen yang digunakan memiliki arah dan besarnya pengaruh yang berbeda terhadap variabel dependen. *Random Effect Model* (REM) akan digunakan ketika lulus pengujian Hausman test.

Dari hasil pengolahan yang sudah dikerjakan memperoleh kesimpulan terlihat pada Tabel 4 berikut:

**Tabel 4
Hasil Pengujian Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Period F	0.099438	(4,86)	0.9824
Period Chi-square	0.438366	4	0.9792

Sesuai dengan hasil pengujian terlihat nilai *probability* hasil pengujian F-period sebesar 0.9828 nilai tersebut jauh diatas 0.05. Dengan demikian penggunaan *fixed effect model* belum tepat untuk digunakan, sehingga lebih baik untuk menggunakan *common effect model*. Pengujian Hausman dilakukan untuk memastikan bahwa Random Effect Model (REM) merupakan alat analisis yang lebih tepat dibandingkan *fixed effect model*. Dari hasil pengolahan data yang sudah dikerjakan diperoleh kesimpulan hasil terlihat pada Tabel 5 dibawah ini:

Tabel 5. Hasil Pengujian Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	9.057761	4	0.0597

Berdasarkan hasil pengolahan yang telah dilakukan diperoleh nilai *probability* Chi-Square sebesar 0.0597. Nilai *probability* tersebut jauh diatas 0.05 sehingga dapat disimpulkan penggunaan *random effect model* lebih tepat dibandingkan *fixed effect model*. Dengan demikian dapat disimpulkan model efek regresi panel yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM).

Sesuai dengan pengujian persyaratan regresi panel yang telah dilakukan maka efek regresi panel yang digunakan adalah Random, sehingga pengujian asumsi klasik tidak wajib untuk dilakukan (Winarno, 2014). Hal tersebut disebabkan didalam *Random Effect Model* (REM) telah menggunakan fungsi EGLS (*Election General Least Square*). Didalam fungsi EGLS diasumsikan tidak terjadinya penyimpangan asumsi klasik pada setiap variabel yang dibentuk kedalam persamaan regresi panel. Dari hasil pengujian hipotesis yang sudah dikerjakan diperoleh kesimpulan terlihat pada Tabel 6 dibawah ini:

Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	54.44506	16.41326	3.317138	0.0013
PDRB	-0.442148	1.315005	-0.336233	0.7375
Lahan	1.461328	0.725573	2.014032	0.0470
Bangunan	0.243740	0.036672	6.646488	0.0000
Inflasi	0.009029	0.502091	0.017983	0.9857
R ²	0.366561	Mean dependent var	60.52464	
Adjusted R ²	0.325074	S.D. dependent var	6.494717	
S.E. of regression	6.412775	Sum squared resid	3701.131	
F-statistic	7.604402	Durbin-Watson stat	2.070451	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Bersemaan dengan hasil pengolahan data yang sudah terlihat bahwa masing masing variabel independen memiliki koefisien regresi yang dapat dibuat kedalam persamaan regresi panel seperti terlihat dibawah ini:

$$Y = 54.445 - 0,442PDRB + 1.461LAHAN + 0.244BANGUNAN + 0,009INFLASI \quad (1)$$

Berdasarkan ringkasan hasil uji hipotesis yang sudah dilakukan, didapat nilai R-square dengan hasil 0,367. Nilai koefisien tersebut dapat dimaknai *product domestic regional bruto* (PDRB), luas lahan, luas bangunan dan inflasi mampu memberikan variasi kontribusi dalam mempengaruhi perubahan realiasi Pajak Bumi dan Bangunan (PDRB) pada 19 kabupaten dan kota sebesar 36.70sisanya sebesar 63.30% lagi dijabarkan oleh variabel lain yg tidak dipakai dalam penelitian ini.

Sesuai dengan model persamaan regresi diketahui bahwa variabel *product domestic regional bruto* (PDRB) memiliki koefisien regresi bertanda negatif sebesar 0,442, pada step pengujian juga didapat hasil *probability* dengan nilai 0.7375. Proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan tingkat kesalahan 0.05. Dengan demikian $P > 0.05$ maka dapat disimpulkan *product domestic regional bruto* tidak memiliki pengaruh signifikan pada realisasi PBB di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Pada tahapan uji hipotesis kedua dengan memakai variabel luas lahan diperoleh koefisien regresi berslope positif dengan nilai 1.461 sdangkan nilai *probability* yg dihasilkan dalam uji t-statistic adalah senilai 0.0470. Pengolahan data dikerjakan dengan memekai tingkat kesalahan 0.05. Hasil yang didapat memperlihatkan bahwa $P < 0.05$ maka dapat disimpulkan kalau luas lahan memiliki pengaruh positif dan signifikan pada realisasi pembayaran PBB di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Sesuai dengan nilai uji hipotesis ketiga dengan menggunakan variabel luas bangunan didapat hasil koefisien regresi bertanda positif dengan nilai 0.244 sedangkan nilai *probability* yang dihasilkan dari uji t-statistic adalah 0.000. Pengolahan data dilaksanakan dengan memakai tingkat kesalahan 0.05. Dengan demikian $P < 0.05$ maka dapat disimpulkan kalau luas bangunan memiliki pengaruh positif dan signifikan pada realisasi PBB pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat

Pada tahapan uji hipotesis keempat dengan memakai variabel inflasi ditemukan memiliki koefisien regresi bertanda positif senilai 0,009, pada langkah pengujian didapat hasil *probability* senilai 0.9857. Langkah pengolahan dilakukan memakai tingkat kesalahan 0.05. Dengan demikian $P > 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan pada realisasi PBB di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Pada tahapan pengujian statistik juga diperoleh hasil pengujian F-statistik dengan nilai *probability* sebesar 0.000. Proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan tingkat kesalahan sebesar 0,05. Dengan demikian nilai $P < 0,05$ kesimpulannya adalah *product domestic regional bruto* (PDRB), luas lahan, luas bangunan dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap realisasi PBB pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama *product domestic regional bruto* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap realisasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Temuan tersebut mengisyaratkan bahwa tinggi atau rendahnya PDRB yang dihasilkan 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat tidak akan mempengaruhi realisasi pembayaran PBB dimasing masing daerah. Temuan tersebut menunjukkan adanya varabel lain yang lebih mempengaruhi perubahan realisasi pajak bumi dan bangunan seperti aturan tegas dari pemerintah, sosialisasi pajak, sanksi yang tegas dan tidak pandang bulu dan berbagai variabel lainnya.

Dengan demikian hipotesis pertama ditolak. Hasil yang didukung oleh hasil penelitian Huda, (2016) yang menemukan bahwa *product domestic regional bruto* (PDRB) tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Enrekang. Selanjutnya hasil penelitian yang konsisten juga diperoleh Novtarisa, et al., (2019) juga menemukan bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan *product domestic regional bruto* tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi pembayaran PBB di Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua ditemukan bahwa luas lahan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin luas lahan yang dimiliki atau dikelola oleh masyarakat maka mengindikasikan akan meningkatnya nilai realisasi PBB khususnya di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat pada tahun 2015 sampai dengan 2019 yang lalu. Hasil yang diperoleh menunjukkan ketika luas lahan yang dimiliki masyarakat semakin luas, tentu PBB yang harus dikeluarkan juga semakin tinggi, ketika seluruh pemilik lahan patuh dan taat dalam membayar pajak maka realisasi PBB di Sumatera Barat semakin tinggi.

Temuan yang diperoleh pada tahapan pengujian hipotesis kedua konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Lisnawati, (2020) menemukan bahwa luas lahan berpengaruh positif terhadap realisasi PBB pada seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat. Hasil yang sejalan juga diperoleh oleh Agustina et al., (2016) menemukan bahwa luas lahan tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi pembayaran PBB di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya hasil penelitian yang sejalan juga diperoleh oleh Febrianti, (2017) yang menemukan bahwa besarnya luas lahan tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bangka Tengah.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga ditemukan luas bangunan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkat jumlah masyarakat yang memiliki bangunan yang luas baik untuk tempat tinggal atau untuk kegiatan usaha maka akan meningkatkan jumlah wajib pajak perorangan yang akan membayar PBB, yang tentunya juga akan mendorong kemungkinan yang lebih besar bagi meningkatnya realiasi PBB pada tahun 2015-2019 yang lalu. Hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan besar luas bangunan akan sejalan dengan luasnya tanah yang dibangun, ketika wajib pajak individu memiliki kepatuhan yang tinggi pada pajak tentu realisasi pembayaran PBB pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat semakin tinggi.

Temuan yang diperoleh pada tahapan pengujian hipotesis ketiga didukung oleh penelitian Tiara (2016) menemukan bahwa luas bangunan tempat tinggal masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian yang sama juga diperoleh oleh Febrianti (2017) yang menemukan bahwa semakin banyak masyarakat yang memiliki luas bangunan rumah yang luas akan semakin meningkatnya realiasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya hasil penelitian yang konsisten juga diperoleh oleh Wawan (2018) yang menemukan bahwa luas bangunan rumah berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sigi.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat ditemukan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Hasil yang didapat menjelaskan kalau tinggi atau rendahnya inflasi tidak akan memengaruhi perubahan realisasi pembayaran PBB pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat pada tahun 2015-2019 lalu. Temuan tersebut menunjukkan tinggi atau rendahnya inflasi tidak akan mempengaruhi realisasi PBB. Dalam hal ini kesadaran masyarakat, sosialissi serta adanya aturan yang tegas dari pemerintah lebih mempengaruhi realisasi pembayaran PBB di Sumatera Barat

Temuan yang diperoleh pada tahapan pengujian hipotesis keempat didukung oleh penelitian Afriyanah dan Waluyo, (2015) yang mengungkapkan tinggi atau rendahnya angka inflasi tidak akan mempengaruhi perubahan realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan-kecamatan Kota Tanggerang. Hasil penelitian yang sama juga diperoleh oleh Agustina et al., (2016) yang juga menemukan bahwa perubahan inflasi yang terjadi tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian yang berbeda diperoleh oleh Brabowo, (2019) menemukan semakin tinggi inflasi yang terjadi pada sebuah daerah maka akan semakin menurunkan realisasi pembayaran PBB di sebuah daerah. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Adnan, (2011) yang menemukan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi pembayaran PBB di sebuah daerah.

SIMPULAN

Sesuai dengan analisis nilai uji hipotesis yang sudah dilakukan dapat dijabarkan beberapa kesimpulan yg menjadi jawaban dari masalah yang diulas dalam penelitian ini yaitu:(1) *Product domestic regional bruto* (PDRB) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap realisasi pembayaran PBB pada 19 kab/kota di Sumatera Barat.(2) Luas lahan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi pembayaran PBB di 19 kab/kota di Sumatera Barat.(3) Luas bangunan memiliki pengaruh positif dan signifikan pada realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.(4) Inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan pada realisasi pembayaran PBB di 19 kab/kota di Sumatera Barat.

Sejalan dengan hasil yang diperoleh maka diajukan beberapa saran diantaranya Bagi pemerintah disarankan untuk terus mendata masyarakat yang memiliki lahan dan bangunan baik untuk tempat hunian atau tempat usaha, mengingat data tersebut penting untuk menentukan wajib pajak perorangan yang harus membayar pajak. Ketika jumlah wajib pajak meningkat dan diiringi dengan kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk membayar pajak maka realisasi pembayaran pajak serta penerimaan pemerintah daerah atau pun pemerintah pusat akan meningkat, selain itu bagi Bagi pemerintah juga disarankan untuk mempertegas pemberian sanksi bagi wajib pajak perorangan atau badan yang lalai memenuhi kewajiban pajak. Sanksi yang diberikan harus tegas dan memberikan efek jera sehingga dapat mendorong meningkatnya kesadaran pajak serta realiasi penerimaan pembayaran pajak bagi pemerintah

DAFTAR RUJUKAN

- Adnan, N. (2011). Analisis Perhitungan Inflasi Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Selatan Periode 2001 - 2011. *Jurnal Ekonomi Pembagunan*, 3, 141–149.
- Afriyanah, & Waluyo. (2015). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Luas Lahan, Jumlah Bangunan, dan Laju Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Studi Empiris Pada Kecamatan Di Kota Tangerang. *Ultima Accounting*, 7(1), 36–53.
- Agustina, S., Susetyo, D., & Yunisvita, D. (2016). Pengaruh PDRB perkapita, jumlah wajib pajak dan inflasi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 1829–5843. Retrieved from <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jep/indexDOI:https://doi.org/10.29259/jep.v14i1.8772>
- Brabowo, R. (2019). Pengaruh Jumlah Penduduk, Laju Inflasi, Jumlah Wisatawan dan Jumlah Hiburan Non-Insidental Terhadap Realiasi Penerimaan PBB di Kota Malang. *Pembangunan Wilayah*, 15(2), 1–9.
- Febrianti, M. (2017). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bangka Tengah. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 56–65.
- Ghozali, I. (2016). *Dasar Dasar Statistik dalam Aplikasi SPSS 19.0*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halimatus Sa'diah, Diyah Probowlan, & A. S. (2019). Dampak Alokasi Dana Desa, Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Penduduk dan Luas Lahan Terhadap Realisasi Penerimaan PBB-P2. *Journal of Bussiness Management and Accounting*, 1(1), 50–65.
- Huda, A. S. N. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempegaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Enrekang. *Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Volume*, 12(1), 97–105.
- Lisnawati, L. (2020). Pengaruh Faktor Demografis dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Realisasi Pajak Bumi dan Bangunanperkotaan dan Pedesaan (Pbb-P2) dan Dampaknya Pada Penerimaan Pajak Daerah Di 18 Kabupaten Di Jawa Barat. *Logistic and Accounting Development*, 1(2), 108–219.
- Novtarisa Dania, Ansofino, Y. M. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Berau. *Jurnal Economic and Education*, 10(2), 54–61.
- Winarno, W. W. (2014). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Menggunakan Eviews* (Cetakan 5). Sleman Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Yulianis Kurnia, Nilma Desri Rosya, & N. S. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan:: Studi kasus di Kabupaten

Boyolali. *E-Jurnal STKIP PGRI Sumatera Barat*, 9(2), 19–29. Retrieved from http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=30638&obyek_id=4